

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	11
BAB III	
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	13
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	13
Pendapatan - LRA	13
Belanja	14
Beban	22
Aset	23
Kewajiban	32
Ekuitas Dana	35
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	36
BAB IV	
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	37
BAB V	
PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk

menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah sebesar Rp.1.262.686.500,- dari total anggaran perubahan sebesar Rp.1.200.000.000,- atau sekitar 105%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000,-	1.262.686.500,-	105%
	JUMLAH	1.200.000.000,-	1.262.686.500,-	105%

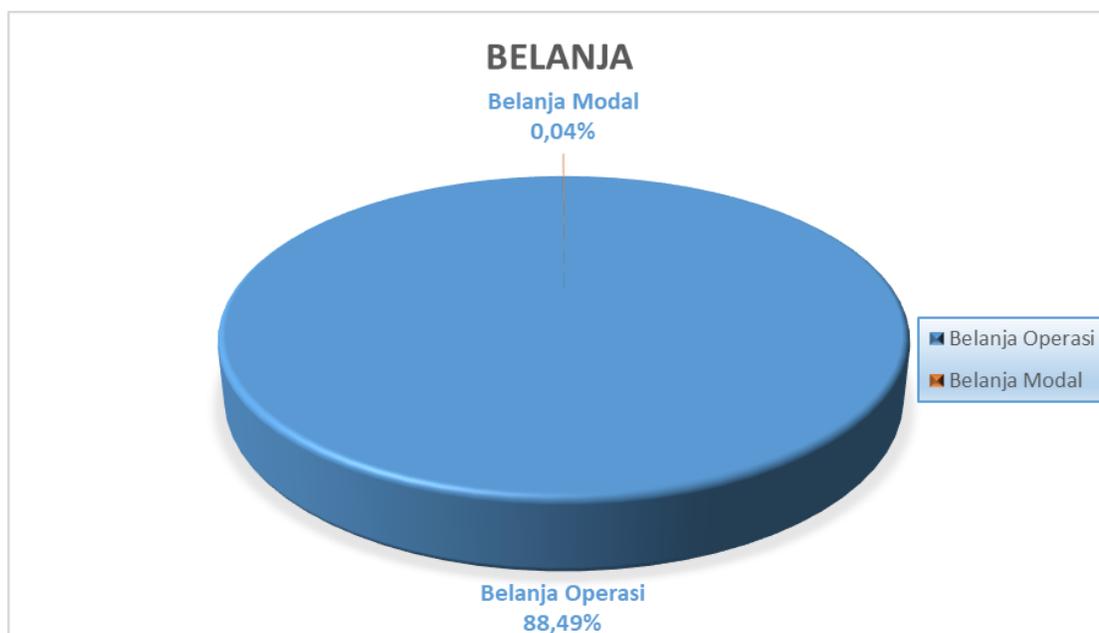
b. Belanja

Alokasi dana APBD Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023 ini sebesar Rp.39.854.786.211,- yang digunakan untuk membiayai 2 jenis belanja yaitu:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp.39.835.986.211,- yang terdiri dari:
 - Belanja Pegawai sebesar Rp.11.859.764.241,-
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.26.776.221.970,-
 - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.1.200.000.000,-
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.18.800.000,-

Adapun Realisasi Belanja Daerah TA 2023 di DPRKPLH adalah sebesar Rp.35.284.825.192,- dengan rincian sebagai berikut: untuk Belanja Operasi sebesar Rp.35.267.525.192,- dan Belanja Modal sebesar Rp.17.300.000,-.

Bagan 3.1
Proporsi Belanja DPRKPLH Kab. Temanggung
Tahun Anggaran 2023



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRKPLH Tahun Anggaran 2023

Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, terbagi dalam masing-masing Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan sebagaimana Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Tahun Anggaran 2023

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten : Temanggung

No	PROGRAM	APBD Perubahan TA 2023	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN			Keuangan	Fisik
1.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.033.380.000	5.031.638.500	99,97%	100%
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kab/Kota	5.033.380.000	5.031.638.500	99,97%	100%
	Sub. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5.033.380.000	5.031.638.500	99,97%	100%
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.803.600.000	5.800.934.324	99,95%	100%
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.803.600.000	5.800.934.324	99,95%	100%
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub. Sistem Pengolahan Setempat	5.803.600.000	5.800.934.324	99,95%	100%
3.	Program Pengembangan Perumahan	220.427.990	215.839.805	98%	100%
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	215.839.805	98%	100%
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	215.839.805	98%	100%

4.	Program Kawasan Permukiman	8.289.606.800	3.990.990.043	48%	100%
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 HA	8.289.606.800	3.990.990.043	48%	100%
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	8.263.868.000	3.965.859.600	48%	100%
	Sub. Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	25.738.800	25.130.443	98%	100%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12.729.218.341	12.584.167.045	99%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.852.464.241	11.730.894.173	99%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.852.464.241	11.730.894.173	99%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.268.000	106.911.185	96,08%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.998.500	5.998.200	99,99%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	20.000.000	19.418.500	97,09%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.996.400	99,98%	100%
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.278.000	21.621.485	85,53%	100%
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.991.500	39.876.600	99,71%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.436.100	568.503.927	97%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	501.350	25%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	94.027.200	93.982.754	99,95%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.408.900	474.019.823	96%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.050.000	177.857.760	99,89%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.050.000	82.945.260	99,87%	100%
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	89.942.500	99,94%	100%

	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.970.000	99%	100%
6.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.000.000	158.765.500	99%	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	160.000.000	158.765.500	99%	100%
	Sub. Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	160.000.000	158.765.500	99%	100%
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	524.003.200	503.206.084	96%	100%
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	127.907.200	123.894.222	97%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	127.907.200	123.894.222	97%	100%
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	396.096.000	379.311.862	96%	100%
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	396.096.000	379.311.862	96%	100%
8.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.143.748.800	1.122.193.274	98%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	1.143.748.800	1.122.193.274	98%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	68.180.400	66.330.652	97%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.075.568.400	1.055.862.632	98%	100%
9.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	35.001.300	33.887.443	97%	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	35.001.300	33.887.443	97%	100%

	Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
10.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	80.000.000	77.329.433	97%	100%
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	77.329.433	97%	100%
	Sub. Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	80.000.000	77.329.433	97%	100%
11.	Program Pengelolaan Persampahan	5.835.799.780	5.765.873.741	99%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	5.835.799.780	5.765.873.741	99%	100%
	Sub. Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	5.135.800.000	5.070.982.882	99%	100%
	Sub. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300.000.000	296.967.000	99%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	399.999.780	397.923.859	99%	100%
	JUMLAH	39.854.786.211	35.284.825.192	88,53%	100%

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Regulasi pengesahan anggaran perubahan yang mepet pada akhir tahun, sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran kurang optimal untuk Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (terbatasnya personil yang mempunyai Sertifikat Barang/Jasa dan terbatasnya personil pengelola kegiatan yang memahami prosedur ketentuan serta tahapan pengadaan barang/ jasa);
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti:
- belum adanya gudang penyimpanan barang habis pakai (ATK, Cetak dsb) dan Barang Milik Daerah;
 - masih kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dalam mendukung operasional kegiatan di bidang-bidang maupun Sekretariat;
 - masih kurangnya kendaraan roda 3 (tossa), roda 4 (pick up), roda 6 (truck) dan arm roll maupun alat berat lainnya didalam mendukung operasional kegiatan pertamanan, kebersihan kota, pengelolaan persampahan di TPS, TPS3R dan juga TPA;
 - belum mempunyai garasi permanen untuk armada kebersihan, persampahan dan pertamanan;
 - masih kurangnya komputer dan peralatan kantor pendukung lainnya di bidang-bidang, UPT dan Sekretariat DPRKPLH;
 - terdapat beberapa Alat Berat di TPA yang rusak, peralatan perkantoran dan juga kendaraan operasional yang rusak yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Realisasi pendapatan selama tahun 2023 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2023, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah pendapatan berupa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Realisasi pendapatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	825.000.000	1.081.363.850	0,-	131%	Retribusi melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.256.363.850,-
	Jumlah Total	825.000.000	1.081.363.850	0,-	131%	

Realisasi pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000	1.262.686.500	0,-	105%	Retribusi melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.62.686.500,-
	Jumlah Total	1.200.000.000	1.262.686.500	0,-	105%	

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan :

- Pembayaran retribusi dilaksanakan pada bulan berjalan, tidak dibayarkan pada bulan berikutnya;
- Adanya retribusi dari warga/ kelompok masyarakat/ pemerintahan desa untuk proses pengelolaan sampah langsung ke TPA;
- Penyesuaian tarif Perda Retribusi Tahun 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 60%;
- Bertambahnya layanan pengelolaan sampah desa ke TPA yang semula pada tahun 2021 sejumlah 133 desa/kelurahan, bertambah menjadi 174 desa/ kelurahan di tahun 2022.

3.1.2. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Realisasi anggaran belanja DPRKPLH Tahun Anggaran 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut dibawah ini:

Tahun Anggaran 2022

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.29.753.401.553,-	Rp.28.837.009.746,-
Belanja Modal	Rp.432.120.681,-	Rp.426.057.945,-
Jumlah	Rp.30.185.522.234,-	Rp.29.263.067.691,-

Tahun Anggaran 2023

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.39.835.986.211,-	Rp.35.267.525.192,-
Belanja Modal	Rp.18.800.000,-	Rp.17.300.000,-
Jumlah	Rp.39.854.786.211,-	Rp.35.284.825.192,-

Realisasi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tanggal 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	APBD PERUBAHAN TA 2023	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN		(Rp)	%	
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.033.380.000	5.031.638.500	99,97%	1.741.500
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kab/Kota	5.033.380.000	5.031.638.500	99,97%	1.741.500
	Sub. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5.033.380.000	5.031.638.500	99,97%	1.741.500
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.803.600.000	5.800.934.324	99,95%	2.665.676
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.803.600.000	5.800.934.324	99,95%	2.665.676

	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub. Sistem Pengolahan Setempat	5.803.600.000	5.800.934.324	99,95%	2.665.676
3	Program Pengembangan Perumahan	220.427.990	215.839.805	98%	4.588.185
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	215.839.805	98%	4.588.185
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	215.839.805	98%	4.588.185
4	Program Kawasan Permukiman	8.289.606.800	3.990.990.043	48%	4.298.616.757
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 HA	8.289.606.800	3.990.990.043	48%	4.298.616.757
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	8.263.868.000	3.965.859.600	48%	4.298.008.400
	Sub. Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	25.738.800	25.130.443	98%	608.357
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12.729.218.341	12.584.167.045	99%	145.051.296
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.852.464.241	11.730.894.173	99%	121.570.068
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.852.464.241	11.730.894.173	99%	121.570.068
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.268.000	106.911.185	96,08%	4.356.815
	Sub. Kegiatan	5.998.500	5.998.200	99,99%	300

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	20.000.000	19.418.500	97,09%	581.500
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.996.400	99,98%	3.600
	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	25.278.000	21.621.485	85,53%	3.656.515
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.991.500	39.876.600	99,71%	114.900
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.436.100	568.503.927	97%	18.932.173
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	501.350	25%	1.498.650
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	94.027.200	93.982.754	99,95%	44.446
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.408.900	474.019.823	96%	17.389.077
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.050.000	177.857.760	99,89%	192.240
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.050.000	82.945.260	99,87%	104.740
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	89.942.500	99,94%	57.500
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	5.000.000	4.970.000	99%	30.000

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.000.000	158.765.500	99%	1.234.500
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	160.000.000	158.765.500	99%	1.234.500
	Sub. Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	160.000.000	158.765.500	99%	1.234.500
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	524.003.200	503.206.084	96%	20.797.116
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	127.907.200	123.894.222	97%	4.012.978
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	127.907.200	123.894.222	97%	4.012.978
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	396.096.000	379.311.862	96%	16.784.138
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	396.096.000	379.311.862	96%	16.784.138
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.143.748.800	1.122.193.274	98%	21.555.526
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	1.143.748.800	1.122.193.274	98%	21.555.526
	Sub. Kegiatan	68.180.400	66.330.652	97%	1.849.748

	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.075.568.400	1.055.862.632	98%	19.705.768
9.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	35.001.300	33.887.443	97%	1.113.857
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	35.001.300	33.887.443	97%	1.113.857
	Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	35.001.300	33.887.443	97%	1.113.857
10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	80.000.000	77.329.433	97%	2.670.567
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	77.329.433	97%	2.670.567
	Sub. Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	80.000.000	77.329.433	97%	2.670.567
11	Program Pengelolaan Persampahan	5.835.799.780	5.765.873.741	99%	69.926.039
	Kegiatan	5.835.799.780	5.765.873.741	99%	69.926.039

	Pengelolaan Sampah				
	Sub. Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	5.135.800.000	5.070.982.882	99%	64.817.118
	Sub. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300.000.000	296.967.000	99%	3.033.000
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	399.999.780	397.923.859	99%	2.075.921
	JUMLAH	39.854.786.211	35.284.825.192	88,53%	4.569.961.019

Penjelasan belanja yang terdapat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup :

1). Belanja Operasi

Belanja Operasi	TA 2022		TA 2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	12.965.457.544	12.472.089.530	11.859.764.241	11.738.194.173
Belanja Barang/Jasa	16.307.944.009	15.899.920.216	26.776.221.970	22.329.331.019
Belanja Bantuan Sosial	480.000.000	465.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Jumlah	29.753.401.553	28.837.009.746	39.835.986.211	35.267.525.192

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.11.738.194.173,- atau 98,98% dari anggaran sebesar Rp.11.859.764.241,-

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.22.329.331.019,- atau 83,39% dari anggaran sebesar Rp.26.776.221.970,-

c) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.200.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,-

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.35.267.525.192,- atau 88,53% dari anggaran sebesar Rp.39.835.986.211,-

2) **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004).

Belanja Modal DPRKPLH terdiri dari:

Belanja Modal	TA 2022		TA 2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
BM Peralatan dan Mesin	188.899.400	183.819.360	18.800.000	17.300.000
BM Gedung dan Bangunan	197.993.900	197.136.585	-	-
BM Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.227.381	45.102.000-	-	-
Total	432.120.681	426.057.945	18.800.000	17.300.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2023 ini, DPRKPLH hanya mempunyai anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.17.300.000,- atau 92,02% dari anggaran sebesar Rp.18.800.000,- .

3.1.3. Beban

Beban yang dimaksud dalam Laporan Operasional adalah Beban yang telah diterbitkan dokumen pembayarannya dan telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, dan barang telah diterima. Beban per-31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.34.908.727.330,-.

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH- LO	1.262.686.500,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.262.686.500,00
7102	Retribusi Daerah-LO	1.262.686.500,00
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	1.262.686.500,00
	Jumlah Pendapatan	1.262.686.500,00
8	BEBAN DAERAH	39.452.259.919,53
81	BEBAN OPERASI	39.449.334.919,53
8101	Beban Pegawai	11.742.467.776,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.094.671.775,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.580.496.001,00
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.300.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	22.334.740.476,00
810201	Beban Barang	5.984.917.255,00
810202	Beban Jasa	5.653.427.956,00
810203	Beban Pemeliharaan	156.818.360,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	208.165.455,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.331.411.450,00
8106	Beban Bantuan Sosial	1.200.000.000,00
810602	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.200.000.000,00

8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.172.126.667,53
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.414.657.195,35
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.181.460.888,75
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	563.647.333,43
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	12.361.250,00
83	DEFISIT NON OPERASIONAL- LO	2.925.000,00
8301	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.925.000,00
830104	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	2.925.000,00
	Jumlah Beban	39.452.259.919,53
	Surplus Defisit LO	(38.189.573.419,53))

3.1.4. Aset

3.1.4.1. Aset Lancar

Aset Lancar yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.85.175.665,- dimana Aset Lancar terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran, Piutang (Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya) dan Persediaan Habis Pakai. Aset Lancar per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.231.471,- dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2022. Perincian Aset Lancar tersaji sebagai berikut:

	TA 2022	TA 2023
Kas	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Piutang	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Persediaan Habis Pakai	Rp.85.407.136,-	Rp.85.175.665,-
Jumlah	Rp.85.407.136,-	Rp.85.175.665,-

3.1.4.1.1. Kas

	TA 2022	TA 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,- sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas di Bendahara Penerimaan

- Kas di Bendahara Penerimaan -SKPD
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun tunai) yang berasal dari pendapatan retribusi persampahan/kebersihan yang sah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan -SKPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,-.
- Kas di Bendahara Penerimaan -Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jasa Giro Bendahara Penerimaan, setiap akhir bulan otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Jadi saldo kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,-.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

- Kas di Bendahara Pengeluaran -SKPD
Merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke

Rekening Kas Umum Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah menyetorkan sisa kas/ UYHD pada Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 29 Desember 2023, sebesar Rp.16.687.013,-. Jadi kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp. 0,-.

- Kas di Bendahara Pengeluaran -Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jasa Giro otomatis langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah di setiap akhir bulan. Jadi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran -Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,-.

3.1.4.1.2. Piutang

Tidak terdapat piutang di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, baik berupa piutang pajak, piutang retribusi maupun piutang lainnya. Untuk Piutang Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan piutang lainnya per tanggal 31 Desember 2023, adalah Rp.0,- .

	TA 2022	TA 2023
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Piutang Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-	Rp. 0,-

3.1.4.1.3. Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung. Persediaan habis pakai berupa

Perabot kantor/ Alat tulis kantor, bahan kimia dan bahan lainnya. Saldo Persediaan Bahan Habis Pakai per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Persediaan :	TA 2022	TA 2023
-Perabot kantor/ alat tulis kantor	Rp.3.059.700,-	Rp.2.803.700,-
-Bahan kimia / bahan lainnya	Rp.82.347.436,-	Rp.82.371.965,-
Jumlah Persediaan	Rp.85.407.136,-	Rp.85.175.665,-

3.1.4.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2023, tersaji sebagai berikut :

	Jenis Aset Tetap	Tahun Anggaran 2022	Realisasi Belanja Modal TA 2023	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar/ Reklas	Nilai Aset Tetap TA 2023
A	Tanah	18.215.385.057	-	1.371.189.826	-	19.586.574.883
B	Peralatan dan Mesin	22.675.754.035	17.300.000,-	460.770.857	2.000.000	23.151.824.892
C	Gedung dan Bangunan	107.680.276.346	-	1.094.266.000	-	108.774.542.346
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.340.198.701	-	39.400.000	-	13.379.598.701
E	Aset Tetap Lainnya	1.083.155.700	-	-	2.925.000	1.080.230.700
F	Konstruksi dalam Pengerjaan	47.622.000	-	-	-	47.622.000
	JUMLAH	163.042.391.839	17.300.000	2.965.626.683	4.925.000	166.020.393.522

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.166.020.393.522,- yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan asset dari realisasi Belanja Modal TA 2023 dan juga mutasi masuk asset.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2023 sebesar Rp.19.586.574.883,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Tanah	Rp.18.215.385.057,-	Rp.19.586.574.883,-

Nilai tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 mengalami perubahan karena ada mutasi masuk senilai Rp.1.371.189.826,-.

No	Uraian	SKPD Asal	Nilai Aset
1	Tanah Hutan Wisata/ Kota di Kowangan, Luas 5360m2, berdasarkan BA Serah Terima BMD No.030/1536/XII/2023	Kelurahan Kowangan	Rp.26.132.000,-
2	Hutan Kota Gumuk Lintang Lingkungan Bendo Kelurahan Kertosari, Luas 9450 m2	DPUPR	Rp.183.750.000,-
3	Ruang Terbuka Hijau Taman Pikatan, Jalan Pahlawan, Luas 1297m2	DPUPR	Rp.475.500.000,-
4	Tanah Rusunawa Kelurahan Kranggan	DPUPR	Rp.117.709.767,-
	Tanah Rusunawa Parakan Kauman		Rp81.348.059,-
	Tanah Rusunawa Kertosari		Rp.59.250.000,-
	Tanah Rusunawa Manggong Ngadirejo		Rp.327.500.000,-
5	Taman Kota Kuda Lumping	Dinbudpar	Rp.100.000.000,-
	Jumlah		Rp.1.371.189.826,-

b. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Peralatan dan Mesin	Rp.22.675.754.035,-	Rp.23.151.824.892,-

Nilai peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan aset berupa Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp.17.300.000,-, mutasi masuk senilai Rp.460.770.857,-, dan reklas Belanja Modal ke barang persediaan senilai Rp.2.000.000,-.

Berikut ini perincian penambahan aset dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, mutasi masuk, dan reklas:

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 Sekretariat:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
BELANJA MODAL	7.800.000	7.800.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.800.000	7.800.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); Tangga Lipat	3.000.000	3.000.000
- Tangga Lipat		3.000.000
Belanja Modal Peralatan Jaringan (Access Point)	4.800.000	4.800.000
- Totolink AC1200 Wireless Dual Band Ceiling Mount AP CA1200- PoE, 3 buah @ 1.250.000,-		3.750.000
TP-Link TL-R470T Load Balance Broadband Router		1.050.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		
Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		
BELANJA MODAL	9.500.000	9.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.500.000	9.500.000
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.500.000	9.500.000
- Mesin Biopori, Auger 62		7.500.000
- Cangkul Lipat 10 buah @ 200.000,-		2.000.000

Mutasi masuk peralatan dan mesin sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD Asal	Nilai Aset
1	Nissan X-trai AA 9504 LN, th 2014, berdasarkan BA Serah Terima No.030/0001379/X/2023	Bagian Umum Setda	Rp.407.670.857,-
2	Kijang Krista AA 1159 XE, th 1997, berdasarkan BA Serah Terima BMD No.030/1053/IX/2023	RSUD	Rp.45.000.000,-
3	TV Monitor Sharp 24 inch, 3 unit @ Rp.2.700.000,- di Rusunawa Manggong, Kertosari dan Kranggan, berdasarkan BA Serah Terima BMD No.B/0001007/030/IX/2023	DPUPR	Rp.8.100.000,-
	Jumlah		Rp.460.770.857,-

Jumlah Total Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.17.300.000,-. Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut, terdapat barang yang harus di *reklas* keluar dari Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) ke barang persediaan senilai Rp.2.000.000,-.

Reklas Peralatan dan Mesin ke Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Cangkul Lipat 10 buah @ 200.000,-	Rp.2.000.000,-
	Jumlah reklas ke Barang Persediaan	Rp.2.000.000,-

Kemudian total jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah:

Peralatan dan Mesin TA 2022	Rp.22.675.754.035,-
Mutasi Masuk	Rp.460.770.857,-
Realisasi Belanja Modal 2023	Rp.17.300.000,-
Reklas BM ke Barang Persediaan	Rp.2.000.000,-
JUMLAH NILAI PERALATAN DAN MESIN TA 2023	Rp. 23.151.824.892,-

c. Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Gedung dan Bangunan	Rp.107.680.276.346,-	Rp.108.774.542.346,-

Nilai Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami perubahan karena ada mutasi masuk senilai Rp.1.094.266.000,- .

Mutasi masuk Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD Asal	Nilai Aset
1	Pagar Permanen Rusunawa Kranggan, 200m2, berdasarkan BA Serah Terima BMD No.B/0001006/030/IX/2023	DPUPR	Rp.1.094.266.000,-
	Jumlah		Rp.1.094.266.000,-

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.340.198.701	13.379.598.701

Nilai jalan, irigasi dan Jaringan mengalami perubahan karena ada mutasi masuk dari DPUPR senilai Rp.39.400.000,-

Mutasi masuk jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD Asal	Nilai Aset
1	Jaringan Air Bersih Rusunawa Kertosari	DPUPR	Rp.19.700.000,-
2	Jaringan Air Bersih Rusunawa Parakan	DPUPR	Rp.19.700.000,-
	Jumlah		Rp.39.400.000,-

e. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Aset Tetap Lainnya	1.083.155.700	1.080.230.700

Nilai Aset tetap lainnya pada tahun 2023 mengalami perubahan, dikarenakan mutasi keluar/ reklas berupa penghapusan sebesar Rp.2.925.000,- untuk tanaman keras Mahoni Rp.2.500.000,- dan tanaman keras Trembesi Rp.425.000,-.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 ini tidak mengalami perubahan atau sama dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 47.622.000,- yang berupa Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan Kranggan.

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Konstruksi dalam pengerjaan	47.622.000	47.622.000

Jadi nilai total Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah sebesar Rp.166.020.393.522,- (sebelum penyusutan).

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Aset Tetap	163.042.391.839	166.020.393.522

3.1.4.3. Aset Lainnya

Nilai Aset lainnya pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.1.251.402.200,- , dimana terdiri dari Aset tidak berwujud senilai Rp.49.445.000,- dan Aset Lain-lain senilai Rp.1.201.957.200,- .

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Aset Lainnya	1.251.402.200	1.251.402.200
	Aset Lain-lain	1.201.957.200	1.201.957.200
	Aset Tidak Berwujud	49.445.000	49.445.000

Jadi total jumlah Aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) tahun 2023 dengan penyusutan adalah sebesar Rp.118.763.823.421,9

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Aset Lancar	85.407.136	85.175.665
2.	Aset Tetap	163.042.391.839	166.020.393.522
	Akumulasi Penyusutan	42.572.468.132,23	47.362.287.640,10
3.	Aset Lainnya	1.251.402.200	1.251.402.200
	Akumulasi Penyusutan	1.220.499.075,00	1.232.860.325,00
	Jumlah Total Aset	120.586.233.968	118.761.823.421,9

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya)

3.1.5. Kewajiban

3.1.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

Didalam Neraca s/d 31 Desember 2023 jumlah kewajiban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan kewajiban jangka pendek yaitu hutang belanja, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, yang dibayarkan pada bulan Januari 2024. Hutang belanja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ada 2 jenis yaitu hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa.

Perincian hutang belanja pegawai:

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2023, Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp.275.361.422,- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp.63.544.500,-	338.905.922
2.	-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	32.500.000
	JUMLAH	371.405.922

Perincian hutang belanja barang dan jasa:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bulan DESEMBER 2023;	6.000.000
	Keg. Peningkt. Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	
	Sub. Keg. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 6.000.000,-	
2.	Membayar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (tenaga operasional Kebun Ngipik Pringsurat) Bulan Desember 2023;	7.250.000
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota,	
	Sub. Keg. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.2.000.000,-	
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 5.250.000,-	
3.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bulan DESEMBER 2023;	64.750.000
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota,	
	Sub. Keg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):	
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 64.750.000,-	
4.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Bulan DESEMBER 2023;	11.350.000
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	Sub. Keg. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.7.850.000,-	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 3.500.000,-	
5.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, 4 orang, Bulan DESEMBER 2023;	7.900.000
	Keg. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota,	
	Sub. Keg. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota,	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 7.900.000,-	
6.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2 orang, Bulan DESEMBER 2023;	3.600.000
	Keg. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/ Kota	
	Sub. Keg. Pelaksanaan Rehabilitasi	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 3.600.000,-	
7.	Membayar Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Persampahan Bulan DESEMBER 2023	13.200.000

	Keg. Pengelolaan Sampah,	
	Sub. Keg. Penanganan Sampah melalui pemilahan dan Pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampahTPS3R, PDU,TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, Biodegester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai denganperaturan perundangan	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 13.200.000,-	
8.	Membayar Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Persampahan DPRKPLH Bulan DESEMBER 2023;	200.500.000
	Keg. Pengelolaan Sampah,	
	Sub. Keg. Penanganan Sampah melalui pemilahan dan Pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampahTPS3R, PDU,TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, Biodegester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai denganperaturan perundangan	
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 200.500.000,-	
9.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Bulan DESEMBER 2023;	35.000.000
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 13.700.000,-	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 8.750.000,-	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 10.800.000,-	
	Belanja Jasa Tenaga Sopir Rp. 1.750.000,-	
10.	Pembayaran Belanja Telepon, Listrik dan Air DPRKPLH, untuk Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2023;	8.148.578
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	- Telepon Rp.1.064.773,-	
	- Air Rp.66.550,-	
	- Listrik Rp.7.017.255,-	
	JUMLAH	357.698.578

Jadi Total Kewajiban jangka pendek adalah Rp.729.104.500,-

3.1.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

Jadi Jumlah Total Kewajiban adalah Rp.729.104.500,- (Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang).

No	Kewajiban	TA 2022	TA 2023
1.	Hutang Belanja Pegawai	367.132.319	371.405.922
2.	Hutang Belanja Barang dan Jasa	354.520.592	357.698.578
	Jumlah	721.652.911	729.104.500

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas DPRKPLH adalah kekayaan bersih DPRKPLH, yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban DPRKPLH. Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ekuitas Awal	119.864.581.056,77
2	Surplus / (Defisit) LO	(38.189.573.419,53)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	2.335.572.592,66
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	34.022.138.692,00
5	Ekuitas Akhir	118.032.718.921,90

Kemudian untuk saldo ekuitas per-31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2023
EKUITAS	119.864.581.056,77	118.032.718.921,90

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Pada CaLK per 31 Desember 2023 terdapat laporan komparasi anggaran, akuntansi dan penatausahaan periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.

Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih Akuntansi - Penatausahaan
		Akuntansi	Penatausahaan	
PUNGUT				
Utang PPh 21		162.161.193	162.161.193	0,00
Utang PPh 22		14.985.264	14.985.264	0,00
Utang PPh 23		8.036.868	8.036.868	0,00
Utang PPh pasal 4 (2)		42.874.058	42.874.058	0,00
Utang PPN Pusat		361.754.590	361.754.590	0,00
Utang Pajak Daerah Katering		11.081.418	11.081.418	0,00
SETOR				
Utang PPh 21		162.161.193	162.161.193	0,00
Utang PPh 22		14.985.264	14.985.264	0,00
Utang PPh 23		8.036.868	8.036.868	0,00
Utang PPh pasal 4 (2)		42.874.058	42.874.058	0,00
Utang PPN Pusat		361.754.590	361.754.590	0,00
Utang Pajak Daerah Katering		11.081.418	11.081.418	0,00
BELANJA DAERAH	39.854.786.211	35.284.825.192	35.284.825.192	0,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Gambaran Umum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. DPRKPLH ini menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. Gerilya No. 20 Maron, Sidorejo (Laboratorium Tembakau), Kode Pos 56251, Telepon/ Faximili (0293) 4901569, Email: dprkplh.temanggungkab@gmail.com .

2. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKPLH mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;

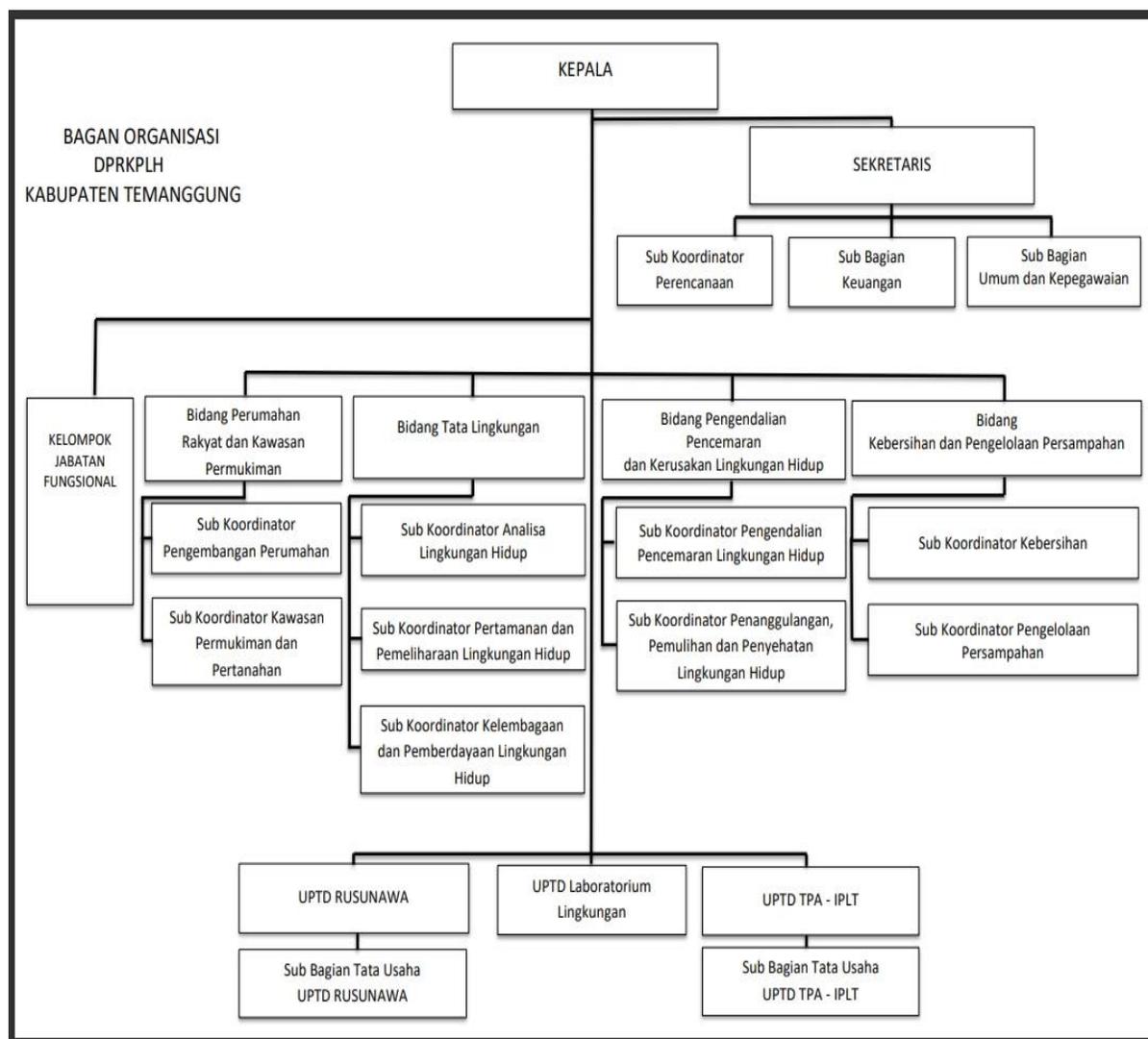
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- d. Bidang Tata Lingkungan
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
- g. Kepala UPTD Rusunawa;
 - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha
- h. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. Kepala UPTD TPA- IPLT;
 - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung



4. Visi dan Misi

Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata **TENTREM, MAREM, dan GANDEM**. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku,

agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif, dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya:
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan Visi dan misi diatas maka DPRKPLH memenuhi misi ke 2 dan ke 3 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Misi 2: Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan.
 - 1) Tujuan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2) Sasaran: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
 - 1) Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
 - 2) Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2023. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dari penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.200.000.000	1.262.686.500	0,-	105%	Retribusi melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.62.686.500,-
	Jumlah Total	1.200.000.000	1.262.686.500	0,-	105%	

b. Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2023

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.39.835.986.211,-	Rp.35.267.525.192,-
Belanja Modal	Rp.18.800.000,-	Rp.17.300.000,-
Jumlah	Rp.39.854.786.211,-	Rp.35.284.825.192,-

2. Neraca

No	Uraian	TA 2022	TA 2023
1.	Aset Lancar	85.407.136	85.175.665
2.	Aset Tetap	163.042.391.839	166.020.393.522
	Akumulasi Penyusutan	42.572.468.132,23	47.362.287.640,10
3.	Aset Lainnya	1.251.402.200	1.251.402.200
	Akumulasi Penyusutan	1.220.499.075,00	1.232.860.325,00
	Jumlah Total Aset	120.586.233.968	118.761.823.421,9

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan penyusutan)

3. Laporan Operasional

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH- LO	1.262.686.500,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.262.686.500,00
7102	Retribusi Daerah-LO	1.262.686.500,00
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	1.262.686.500,00
	Jumlah Pendapatan	1.262.686.500,00
8	BEBAN DAERAH	39.452.259.919,53
81	BEBAN OPERASI	39.449.334.919,53
8101	Beban Pegawai	11.742.467.776,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.094.671.775,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.580.496.001,00
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.300.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	22.334.740.476,00
810201	Beban Barang	5.984.917.255,00
810202	Beban Jasa	5.653.427.956,00
810203	Beban Pemeliharaan	156.818.360,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	208.165.455,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.331.411.450,00
8106	Beban Bantuan Sosial	1.200.000.000,00
810602	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.200.000.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.172.126.667,53
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.414.657.195,35
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.181.460.888,75
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	563.647.333,43
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	12.361.250,00
83	DEFISIT NON OPERASIONAL- LO	2.925.000,00
8301	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.925.000,00
830104	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	2.925.000,00

	Jumlah Beban	39.452.259.919,53
	Surplus Defisit LO	(38.189.573.419,53)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ekuitas Awal	119.864.581.056,77
2	Surplus / (Defisit) LO	(38.189.573.419,53)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	2.335.572.592,66
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	34.022.138.692,00
5	Ekuitas Akhir	118.032.718.921,90

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

PRASODJO, SAq, MM

NIP. 19660402 198903 1 013

